



## **PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN USAHA TAMBAK BANDENG DAN UDANG DI WILAYAH PESISIR GAMPONG LAMNGA KABUPATEN ACEH BESAR**

### **IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF MILKFISH AND SHRIMP POND ENTERPRISES IN THE COASTAL AREA OF GAMPONG LAMNGA, ACEH BESAR REGENCY**

**Badruzzaman<sup>1</sup>, Novi Mailidarni<sup>2\*</sup>, Akhyar<sup>1</sup>, Zamzami<sup>1</sup>, Tasliati Djafar<sup>2</sup>, Nyak Yusfa Afrina<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Teaching of the Public Administration, Iskandar Muda University, Banda Aceh

<sup>2</sup>Teaching of the Agrotechnology Iskandar Muda University, Banda Aceh

\*Email Koresponden: [novimailidarni92@gmail.com](mailto:novimailidarni92@gmail.com)

#### **Abstract**

This Community Service Program (CSP) aimed to implement the principles of good governance in the management of milkfish and shrimp pond enterprises in the coastal area of Gampong Lamnga, Aceh Besar Regency. The main problems faced by the community include weak governance, limited community participation in decision-making, and the suboptimal role of village government in managing and supervising pond-based fisheries enterprises. The CSP activities were carried out through socialization sessions, focus group discussions (FGDs), institutional assistance, and evaluation of the implementation of good governance principles, including transparency, participation, accountability, and effectiveness. The results indicate improved community understanding of good governance practices, increased involvement of pond farmer groups in planning and management, and a strengthened role for village authorities as facilitators and local regulators. The implementation of good governance principles improved the management of milkfish and shrimp pond enterprises and supported sustainable coastal economic development in Gampong Lamnga.

**Keywords:** *Good Governance, Pond Management, Milkfish, Shrimp, Coastal Community*

#### **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang di wilayah pesisir Gampong Lamnga, Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah lemahnya tata kelola usaha tambak, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya peran pemerintah gampong dalam pengelolaan dan pengawasan usaha perikanan tambak. Metode pelaksanaan PkM meliputi sosialisasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), pendampingan kelembagaan, serta evaluasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola usaha yang baik, meningkatnya keterlibatan kelompok usaha tambak dalam perencanaan dan pengelolaan, serta penguatan peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dan regulator lokal. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola usaha tambak dan mendukung pengembangan ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Gampong Lamnga.



**Kata kunci:** Good Governance, Usaha Tambak, Bandeng, Udang, Masyarakat pesisir

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sektor perikanan, termasuk budidaya tambak bandeng dan udang, tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal, penyedia lapangan kerja, dan penopang kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam banyak komunitas pesisir, usaha tambak telah menjadi sumber penghidupan utama yang menopang stabilitas sosial dan ekonomi rumah tangga. Namun, optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola publik yang diterapkan dalam pengelolaannya (FAO, 2022).

Pengelolaan usaha tambak di wilayah pesisir menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan, terutama pada aspek tata kelola. Berbagai studi menunjukkan bahwa permasalahan yang sering muncul tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis budidaya, tetapi lebih pada lemahnya sistem pengelolaan, keterbatasan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Bennett *et al.*, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan produksi saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan usaha tambak tanpa diimbangi dengan tata kelola yang baik dan inklusif.

Konsep *good governance* menjadi salah satu kerangka penting dalam administrasi publik untuk menjawab tantangan pengelolaan sektor publik dan sumber daya bersama. *Good governance* menekankan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan publik (UNDP, 2020). Dalam konteks pengelolaan usaha tambak, penerapan prinsip-prinsip tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, serta dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan administratif.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk perikanan dan budidaya tambak, juga dipandang sebagai prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan. FAO (2022), menegaskan bahwa tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik kepentingan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, tata kelola yang kuat dan partisipatif mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam konteks administrasi publik modern, pendekatan *collaborative governance* menjadi semakin relevan dalam pengelolaan sektor-sektor yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan, termasuk sektor perikanan. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik (Emerson & Nabatchi, 2023). Melalui kolaborasi tersebut, kebijakan yang



dihasilkan tidak hanya lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat di tingkat komunitas.

Peran pemerintah desa atau gampong menjadi sangat penting dalam implementasi *good governance* di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Studi Satria *et al.* (2022), menunjukkan bahwa penguatan peran pemerintah desa dalam tata kelola pesisir dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha ekonomi lokal, termasuk usaha tambak, melalui fasilitasi partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, pemerintah gampong tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator dan regulator lokal dalam pengelolaan usaha tambak.

Gampong Lamnga, yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu contoh wilayah yang memiliki potensi tambak bandeng dan udang yang cukup besar. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada usaha tambak sebagai sumber pendapatan utama. Namun, pengelolaan usaha tambak di Gampong Lamnga masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya mekanisme koordinasi antara kelompok usaha tambak dan pemerintah gampong, terbatasnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan usaha, serta rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat dalam mengelola usaha secara kolektif.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan praktik tata kelola yang diterapkan di tingkat lokal. Tanpa penerapan prinsip *good governance*, usaha tambak berisiko dikelola secara individual dan tidak terkoordinasi, sehingga sulit berkembang secara berkelanjutan. Bennett *et al.* (2021), menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan tata kelola dan memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap usaha bersama.

Selain itu, penguatan tata kelola publik di tingkat lokal juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi pesisir yang lebih inklusif. OECD (2021), menyatakan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang pada gilirannya mendorong partisipasi publik dan keberlanjutan program pembangunan. Dalam konteks pengelolaan usaha tambak, kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah gampong menjadi modal sosial penting untuk membangun kerja sama jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang di Gampong Lamnga menjadi sangat relevan, baik dari perspektif teori administrasi publik maupun praktik pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan PkM ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas masyarakat serta aparatur gampong dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha tambak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengelolaan usaha tambak tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi model tata kelola publik yang berkelanjutan di tingkat desa.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang di wilayah pesisir. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada 13 Oktober hingga 1 November 2025 di Gampong Lamnga, Kecamatan Baiturrahman, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik wilayah pesisir yang memiliki potensi tambak bandeng dan udang serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama.

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses tata kelola, dinamika kelembagaan, serta interaksi antara pemerintah Gampong dan masyarakat dalam pengelolaan usaha tambak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan administratif secara kontekstual, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif produksi tambak, melainkan pada aspek tata kelola publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kajian Administrasi Publik.

### Subjek dan Sasaran Kegiatan

Subjek dalam kegiatan PkM ini meliputi aparaturnya pemerintah Gampong, kelompok usaha tambak bandeng dan udang, serta masyarakat pesisir yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan usaha tambak. Sasaran kegiatan difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat serta aparaturnya gampong terkait prinsip *good governance* dalam pengelolaan usaha tambak secara kolektif dan berkelanjutan.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi lapangan, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan usaha tambak, pola interaksi antar pelaku, serta peran pemerintah gampong dalam pengelolaan usaha tersebut.
2. Wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan kepada aparaturnya gampong dan perwakilan kelompok usaha tambak guna menggali informasi mengenai mekanisme pengambilan keputusan, transparansi pengelolaan, serta bentuk partisipasi masyarakat.
3. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk membahas permasalahan, kebutuhan, serta solusi terkait penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan usaha tambak.
4. Dokumentasi, berupa pencatatan kegiatan, notulensi diskusi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pengelolaan usaha tambak di tingkat gampong.



### Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap persiapan, meliputi koordinasi dengan pemerintah gampong, identifikasi awal permasalahan, serta penyusunan materi sosialisasi.
2. Tahap pelaksanaan, berupa sosialisasi prinsip *good governance*, diskusi partisipatif, dan pendampingan kelembagaan kelompok usaha tambak.
3. Tahap evaluasi, untuk menilai perubahan pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta aparatur gampong dalam pengelolaan usaha tambak setelah kegiatan PkM dilaksanakan.

### Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada sejauh mana prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan peran pemerintah gampong. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk menggambarkan perubahan dan capaian kegiatan PkM.

### Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan PkM ini meliputi meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur gampong terhadap prinsip *good governance*, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha tambak, serta adanya penguatan peran pemerintah gampong sebagai fasilitator dalam tata kelola usaha ekonomi pesisir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Awal Pengelolaan Usaha Tambak di Gampong Lamnga

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa usaha tambak bandeng dan udang di Gampong Lamnga merupakan sektor ekonomi utama yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Sebagian besar masyarakat mengelola tambak secara mandiri dengan pola pengelolaan yang masih bersifat tradisional dan belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan yang kuat. Kondisi ini sejalan dengan temuan FAO (2022), yang menyatakan bahwa usaha perikanan skala kecil di wilayah pesisir umumnya menghadapi tantangan kelembagaan dan tata kelola, sehingga memerlukan intervensi kebijakan dan penguatan kapasitas publik.

Sebelum kegiatan PkM dilaksanakan, pengelolaan usaha tambak di Gampong Lamnga cenderung berjalan secara individual dan minim koordinasi dengan pemerintah gampong. Mekanisme komunikasi dan penyampaian informasi terkait pengelolaan usaha belum berjalan secara sistematis. Hal ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *good governance*, khususnya pada aspek transparansi dan partisipasi, sebagaimana juga ditemukan dalam studi pengelolaan sumber daya pesisir di berbagai wilayah berkembang (Bennett *et al.*, 2021).



## 2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Usaha Tambak

Penerapan prinsip transparansi menjadi salah satu capaian utama dalam kegiatan PkM ini. Transparansi diwujudkan melalui forum sosialisasi dan diskusi terbuka yang melibatkan aparaturnya gampong dan kelompok usaha tambak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai peran pemerintah gampong, dukungan kebijakan yang tersedia, serta pentingnya pengelolaan usaha tambak secara kolektif dan terbuka.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong. Kondisi ini sejalan dengan pandangan OECD (2021), yang menegaskan bahwa transparansi dalam tata kelola publik berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Namun demikian, transparansi yang diterapkan masih bersifat awal dan memerlukan penguatan melalui sistem administrasi yang berkelanjutan agar tidak hanya bergantung pada komunikasi lisan semata.

## 3. Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Good Governance

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip inti dalam *good governance* yang menentukan keberhasilan pengelolaan usaha publik. Hasil kegiatan PkM menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan usaha tambak. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD), masyarakat secara aktif menyampaikan permasalahan dan aspirasi mereka terkait pengelolaan tambak.

Peningkatan partisipasi ini mencerminkan pergeseran peran masyarakat dari sekadar penerima kebijakan menjadi aktor yang terlibat langsung dalam proses tata kelola. Temuan ini sejalan dengan Bennett *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat meningkatkan efektivitas tata kelola serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap usaha bersama. Meskipun demikian, tingkat partisipasi yang belum merata menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan agar seluruh kelompok masyarakat dapat terlibat secara optimal.

## 4. Akuntabilitas dan Peran Pemerintah Gampong

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan usaha tambak diwujudkan melalui kejelasan peran dan tanggung jawab antara pemerintah gampong dan kelompok usaha tambak. Hasil PkM menunjukkan bahwa pemerintah gampong mulai mengambil peran sebagai fasilitator dan pengawas, bukan sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip administrasi publik modern yang menekankan pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan masyarakat (UNDP, 2020).

Akuntabilitas juga tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Satria *et al.* (2022), menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah desa dalam tata kelola ekonomi lokal mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang bergantung pada sumber daya bersama.



## 5. Implikasi Penerapan Good Governance terhadap Pengelolaan Usaha Tambak

Penerapan prinsip *good governance* dalam kegiatan PkM ini memberikan implikasi positif terhadap pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang di Gampong Lamnga. Transparansi dan partisipasi yang meningkat berkontribusi pada terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan pemerintah gampong. Kondisi ini memperkuat modal sosial yang menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan (OECD, 2021).

Selain itu, pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam PkM ini sejalan dengan konsep *collaborative governance*, di mana pengelolaan usaha publik dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat (Emerson & Nabatchi, 2023). Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan usaha tambak dilakukan secara lebih adaptif terhadap kondisi lokal serta meningkatkan legitimasi kebijakan di tingkat gampong.

## 6. Pembahasan dalam Perspektif Administrasi Publik

Dari perspektif administrasi publik, hasil kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di tingkat gampong mampu memperbaiki kualitas tata kelola publik dalam pengelolaan usaha ekonomi masyarakat. Penerapan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha tambak, tetapi juga memperkuat peran pemerintah gampong sebagai aktor kunci dalam pembangunan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Emerson & Nabatchi (2023), menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif menjadi pendekatan yang relevan dalam mengelola sektor publik yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

Dengan demikian, hasil PkM ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang di wilayah pesisir memerlukan pendekatan administrasi publik yang berbasis *good governance* agar mampu mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara jangka panjang.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan usaha tambak bandeng dan udang di Gampong Lamnga Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa tata kelola usaha tambak masyarakat masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola publik yang baik. Pengelolaan usaha tambak masih didominasi oleh pengalaman individu dan belum didukung oleh sistem manajemen yang terstruktur.

Prinsip partisipasi masyarakat telah berjalan melalui keterlibatan langsung warga sebagai pelaku usaha tambak, namun belum terorganisasi secara kolektif dalam kelembagaan yang kuat. Dari aspek akuntabilitas, sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan pencatatan dan pelaporan usaha secara sederhana, sehingga pengelolaan usaha belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, prinsip transparansi dalam penyampaian informasi terkait



program pemerintah, bantuan usaha, dan kebijakan pengelolaan tambak masih terbatas dan belum merata di kalangan masyarakat.

Melalui kegiatan PkM ini, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan usaha tambak sebagai bagian dari penguatan tata kelola publik di tingkat desa. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tambak bandeng dan udang, serta mendukung pembangunan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

### Saran

Pemerintah gampong diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendorong penerapan prinsip *good governance* melalui penguatan kelembagaan usaha tambak dan peningkatan transparansi informasi terkait program dan kebijakan publik. Masyarakat pelaku usaha tambak disarankan untuk mulai menerapkan pencatatan usaha secara sederhana sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memberikan pendampingan berkelanjutan, khususnya dalam aspek tata kelola dan manajemen usaha tambak. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan dapat melanjutkan kegiatan pengabdian yang berorientasi pada penguatan tata kelola publik dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kegiatan PkM dan penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan usaha tambak di wilayah pesisir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2021). *Collaborative governance and public service delivery*. Public Management Review, 23(6), 849–870. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1774423>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2020). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2021). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31(1), 1–19. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa005>.
- Fauzi, A., & Anna, Z. (2020). Governance of coastal and marine resources in Indonesia: Challenges and opportunities. *Ocean & Coastal Management*, 188, 105–117.
- Grindle, M. S. (2022). *Good governance revisited: Development, reform, and the politics of public management*. Cambridge University Press.
- Haryanto, J. T., & Pratama, R. A. (2021). Village governance and community-based economic development in coastal areas. *Journal of Public Administration Studies*, 6(2), 89–101.
- Kurniawan, R. C., & Setiawan, D. (2023). Good governance practices in village-level public administration in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 45–58.



- 
- OECD. (2020). *Policy framework on sound public governance*. OECD Publishing.  
<https://doi.org/10.1787/3e4dea6d-en>.
- Rasyid, M. R., & Yuliani, S. (2022). Community participation and accountability in coastal resource management. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 233–247.
- Rhodes, R. A. W. (2021). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2021). Community empowerment and village governance in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 82, 312–323.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.012>
- UNDP. (2020). *Human development report: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2022). *Governance and institutions for sustainable development*. World Bank Publications.